



ETIKA PANCASILA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT SUNDA DAN BETAWI

Pancasila Ethics in The Life of Sunda and Betawi Communities

Tresna Suhartoni

Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial
Universitas Indraprasta PGRI Jakarta
tresna.suhartoni.07@gmail.com

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai etika Pancasila dalam kehidupan masyarakat Sunda dan Betawi. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya memahami peran etika Pancasila sebagai landasan moral dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, dengan mengumpulkan data dari jurnal ilmiah, buku referensi, dan publikasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan dalam tata krama antara masyarakat Sunda dan Betawi, di mana tata krama Sunda mencakup aspek waktu, ruang lingkup, dan strata sosial, sementara tata krama Betawi sangat dipengaruhi oleh ajaran agama Islam. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai etika Pancasila memainkan peran krusial dalam membentuk perilaku dan interaksi sosial masyarakat Sunda dan Betawi. Kesantunan sosial dan adaptasi terhadap budaya modern menjadi fokus utama dalam penerapan etika Pancasila. Sebagai saran, penting untuk terus mempromosikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari guna memperkuat identitas budaya dan harmoni sosial di masyarakat. Dengan demikian, diharapkan generasi muda Indonesia dapat menjadi pribadi yang unggul, adaptif, dan mempertahankan warisan budaya bangsa. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman tentang pentingnya etika Pancasila dalam kehidupan masyarakat lokal di Indonesia.

Kata kunci: Pancasila, Etika, Tatakrma, Masyarakat Sunda, Orang Betawi.

ABSTRACT: This research aims to analyze the ethical values of Pancasila in the lives of Sundanese and Betawi people. The background to this research is the importance of understanding the role of Pancasila ethics as a moral foundation in the social life of Indonesian society. The research method used is literature study, by collecting data from scientific journals, reference books and related publications. The research results show differences in etiquette between Sundanese and Betawi communities, where Sundanese etiquette includes aspects of time, scope and social strata, while Betawi etiquette is strongly influenced by Islamic religious teachings. From the research results, it can be concluded that the ethical values of Pancasila play a crucial role in shaping the behavior and social interactions of the Sundanese and Betawi people. Social politeness and adaptation to modern culture are the main focus in implementing Pancasila ethics. As a suggestion, it is important to continue to promote and practice Pancasila values in everyday life in order to strengthen cultural identity and social harmony in society. In this way, it is hoped that Indonesia's young generation can become superior, adaptive individuals and maintain the nation's cultural heritage. This research contributes to strengthening understanding of the importance of Pancasila ethics in the lives of local communities in Indonesia.

Keywords: Pancasila, Ethics, Manners, Sundanese Society, Betawi People.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara merdeka dengan sistem pemerintahan republik, berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang dirumuskan oleh para pendiri Indonesia berdasarkan nilai-nilai jati luhur budaya bangsa Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang terdiri dari berbagai macam ras, suku, etnis, dan budaya. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis, lebih tepatnya 1.340 suku bangsa di tanah air, dan 742 bahasa atau dialek. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah sangat luas, terdiri dari belasan ribu pulau, serta memiliki budaya dan cara hidup masyarakat yang beragam. Indonesia mewarisi kebhinekaan budaya yang dapat hidup berdampingan yang merupakan kekayaan dalam khasanah budaya nasional. Keanekaragaman budaya Indonesia dapat memiliki keunggulan dibandingkan dengan negara lainnya.

Jumlah penduduk Indonesia lebih dari 200 juta jiwa yang tersebar di pulau-pulau Indonesia. Penduduk Indonesia mendiami suatu wilayah dengan kondisi geografis yang bervariasi, mulai dari pegunungan, tepian hutan, pesisir, dataran rendah, pedesaan, hingga perkotaan. Salah satu kebudayaan di Indonesia yang telah lama ada dan menghiasi khasanah budaya Indonesia adalah kebudayaan sunda, dan betawi. Kebudayaan sunda dan betawi merupakan salah satu kebudayaan paling tua di Indonesia. Kebudayaan sunda dan betawi memiliki ciri khas yang identik sesuai tradisi, tata krama, serta sikap hidup dari masyarakat sunda tersebut.

Seperti yang sudah diketahui, bahwa Pancasila merupakan bentukan dari dua kata yang berasal dari Bahasa Sanskerta, yakni "Panca" dan "Sila". Dimana kata "Panca" memiliki arti lima dan "Sila" berarti dasar. Sehingga jika digabungkan menjadi Pancasila yang berarti lima dasar. Dasar yang dimaksud yakni Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang berjumlah lima.

Hal ini sejalan dengan arti terminologi menurut Sukarno pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila juga merupakan hasil pemikiran secara

mendalam para tokoh pendiri bangsa yang kemudian sepakat menjadikan lima butir Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Mubarak dalam Aini, dan Dewi (2022:120). Menurut Habibullah dalam Aini, dan Dewi (2022:121), bahwa Pancasila dinilai sudah ada sejak zaman dahulu dan tidak dibentuk dengan begitu saja. Pancasila dibentuk oleh sejarah dan kebiasaan adat istiadat masyarakat Indonesia, seperti gotong royong, kebersamaan, serta nilai ketuhanan walaupun kepercayaan yang dianut berbeda dengan masyarakat Indonesia pada zaman sekarang. Pada saat itu, pembentukan Pancasila sebagai dasar negara bertujuan agar selalu dihormati, dihargai, dijaga, serta diimplementasikan oleh setiap individu masyarakat tanpa adanya keraguan.

Berdasar pada pendapat Habibullah, bahwa pengertian Pancasila adalah kekokohan masyarakat Indonesia dari nenek moyang turun kepada anak, cucunya yang sudah lama tertanam oleh kultur barat. Dengan begitu, Pancasila bukan hanya menjadi prinsip negara, akan tetapi menjadi pemikiran bagi bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan dasar negara yang menyimpan panduan serta pengaturan mengenai budi pekerti yang fundamental dan benar.

Berbeda dengan Notonegoro dalam Putri, dan Dewi (2021:178), menuturkan Pancasila ialah dasar pemikiran negeri Indonesia, oleh sebab itu dapat disebutkan bahwa Pancasila ialah dasar pemikiran serta ajaran negara yang dijadikan tumpuan yang dapat memebentuk pendirian hidup bangsa Indonesia, sebagai dasar negara, karakter negara, perhimpunan dan kepaduan.

Dari pernyataan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan, bahwa Pancasila adalah pengantar falsafah bangsa Indonesia. Selain itu Pancasila sebagai pedoman kaidah petunjuk perilaku yang baik dan pemersatu pengetahuan hidup bangsa Indonesia. Selain itu Pancasila sebagai sistem etika harus dipatuhi oleh seluruh rakyat Indonesia. Adapun nilai-nilai

yang tercantum pada Pancasila, di halaman berikutnya :

- a. Nilai dasar yaitu nilai yang berkarakter transcendental, serta tidak mampu di cermati oleh pemahaman manusia, tetapi pada kesaksiannya nilai berurusan dengan perilaku manusia.
- b. Nilai instrumen yaitu nilai yang sebagai panduan perwujudan dari nilai dasar. Isinya belum bisa kasat mata sepenuhnya apabila tidak bisa menyusun serta mengukur atau kedudukan yang jelas.
- c. Nilai praktis yaitu penjelasan nilai sebelumnya dalam gerakan yang lebih berwujud maka begitu nilai ini, ialah perwujudan secara kasat mata dari nilai sebelumnya.

Etika Pancasila merupakan cabang ilmu filsafat yang diuraikan menurut nilai sila Pancasila untuk mengelola budi pekerti kehidupan perilaku bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Menurut Dwi Yanto dalam Putri, dan Dewi. (2021:178), bahwa nilai sila Pancasila dalam dasarnya bukanlah merupakan suatu panduan pribadi yang berkepribadian berpegang teguh pada norma ataupun pragmatis tetapi merupakan suatu sistem nilai etika yang wajib dibariskan seterusnya dalam norma etika, moral, dan hukum dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan.

Menurut Amri dalam Aini (2022:11123), bahwa pengembangan Pancasila sebagai sistem etika, memerhatikan beberapa hal, yakni : (1) Pancasila ditempatkan menjadi sumber utama penentu moral, tata krama, serta penentu dalam bersikap dan bertindak dalam setiap keputusan yang diambil; (2) Pancasila sebagai pemberi pedoman dalam bersosialisasi dalam tingkatan regional, nasional, bahkan internasional, (3) Dasar analisis kebijakan berasal dari Pancasila, sehingga semangat dan jiwa dapat tercerminkan; dan (4) Kepluralisan dalam semua bidang di Indonesia dapat terfilter melalui Pancasila. Berdasarkan pendapat Amri, bahwa pada hakikatnya masyarakat Indonesia lebih mengenal etika sebagai tata krama yang mengacu kepada sebuah kajian mengenai

segala perilaku yang sifatnya baik dan dapat diterima oleh masyarakat dalam tingkatan regional, nasional, bahkan Internasional. Nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat yang diangkat dari kebudayaan, adat istiadat, serta kebiasaan leluhur Indonesia. Dalam kata lain, Pancasila sebagai sistem etika berisi norma-norma mendasar yang digunakan sebagai tolak ukur dalam memandang dan menentukan segala bentuk perilaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila tersebut bersifat mengikat setiap tatanan kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut juga menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yang memiliki sistem etika sebagai bentuk implementasi Pancasila dalam segala aspek kehidupan. Sistem etika tersebut berasal dari gagasan nilai-nilai Pancasila. Sistem etika Pancasila memiliki konsep yang berfungsi sebagai pandangan dalam menyelesaikan permasalahan yang mengakar di Indonesia secara rasional. Sebab permasalahan-permasalahan tersebut berasal dari kurangnya perhatian terhadap implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini merupakan bukti pentingnya etika Pancasila dalam mengarahkan atau sebagai prinsip utama dalam kehidupan masyarakat yang sesuai dengan Pancasila. Sehingga etika Pancasila sangat diharapkan sebagai tuntunan moral atau tata krama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Hudiarini dalam Aini, dan Dewi (2022:121), bahwa etika dalam bahasa Yunani adalah *Ethos* yang merupakan istilah untuk perasaan, kebiasaan, adat istiadat, watak, serta cara berpikir untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang baik atau buruk, sedangkan dalam pengertian etimologisnya etika merupakan ilmu yang membahas tentang segala kebiasaan atau adat istiadat. Sementara itu, dalam bahasa Prancis yakni *Etiquete* yang memiliki arti sebuah peraturan yang mengatur dan menetapkan segala tingkah laku dalam kehidupan sosial atau kehidupan dengan orang lain.

Masyarakat Indonesia lebih mengenal etika sebagai tata krama yang mengacu kepada sebuah kajian mengenai segala perilaku yang sifatnya baik dan bersifat dapat diterima oleh masyarakat. Masyarakat umumnya berpendapat bahwa prinsip-prinsip etika, diantaranya:

- a. Kejujuran;
- b. Integritas;
- c. Komitmen;
- d. Adil;
- e. Peduli;
- f. Bertanggung jawab; dan
- g. Menaati apa yang telah disepakati.

Menurut Subekti dalam Aini, dan Dewi (2022:122)., etika juga dipandang sebagai filsafat moral yang berarti pemikiran yang rasional tentang mengapa dan bagaimana manusia harus menjalankan moralitas tertentu serta bagaimana manusia dapat bertanggung jawab atas perbuatan moralitas tersebut.

Dalam Pancasila banyak terkandung nilai-nilai yang saling berhubungan, ketergantungan, dan tidak dapat dipisahkan. Begitupun dengan etika dan sistem-sistemnya dalam Pancasila. Nilai yang terdapat dalam Pancasila diantaranya nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, serta nilai sosial. Etika Pancasila terbentuk dari kelima nilai Pancasila tersebut, Khoiriah dalam Aini, dan Dewi (2022:122). Berikut ini penjabaran mengenai etika Pancasila menurut Soeprapto dalam Aini, dan Dewi (2022:122), sebagai berikut :

- a. Etika Pancasila yang merupakan etika keutamaan yang susunannya berasal dari nilai-nilai moral bangsa Indonesia karena etika keutamaan mengutamakan moral yang terdapat pada setiap individu masyarakat. Moral yang diutamakan dalam hal ini ialah rasa setia, jujur, ketulusan, serta sayang menyayangi. Etika keutamaan beranggapan bahwa orang yang bermoral melakukan tindakan atau perilaku yang baik yang merupakan bentukan dari pembelajaran atau pengalaman nyata yang pernah terjadi sepanjang hidupnya.
- b. Etika Pancasila sebagai etika teleologi yang menjadikan Pancasila sebagai

pedoman setiap masyarakat Indonesia untuk mencapai segala tujuan dan cita-cita. Termasuk pada zaman yang semakin canggih seperti saat ini. Untuk mencapai segala tujuan dan cita-cita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini diperlukan pendalaman pemahaman mengenai sistem nilai dari Pancasila agar setiap tindakan yang dilakukan tidak keluar dari ideologi negara.

- c. Etika Pancasila yang merupakan etika deontologi sebagai penuntun dalam menumbuhkan kesadaran dalam mengimplementasikan Pancasila kepada generasi bangsa khususnya generasi muda Indonesia untuk persiapannya menuju masa depan. Persiapan untuk generasi muda yang harus dikukuhkan ialah kemampuan untuk beradaptasi dengan kebudayaan modern dan menyelaraskan sosio-kultural yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Sebab zaman akan membentuk setiap individu masyarakat menjadi pribadi yang lebih kompleks pada zamannya. Oleh karena itu, kemampuan para generasi muda harus terus ditingkatkan untuk membentuk pribadi unggul yang adaptif.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka tujuan penulisan artikel ini yaitu untuk mendeskripsikan :

- a. Nilai-nilai etika Pancasila dalam kehidupan masyarakat sunda.
- b. Nilai-nilai etika Pancasila dalam kehidupan masyarakat betawi.

METODA

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data yang bersumber dari studi kepustakaan atau studi literatur. Menurut J. Supranto seperti yang dikutip Ruslan (2010:31) dalam bukunya Metode Penelitian *Public Relations* dan Komunikasi, bahwa studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan.

Berdasarkan pendapat Ruslan, bahwa Metode penelitian studi pustaka (*library research*) adalah pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber tertulis. Penelitian ini sangat penting dalam memahami konsep-konsep teoretis, mengidentifikasi penelitian sebelumnya, dan menemukan kesenjangan dalam literatur yang ada. Metode ini sangat cocok untuk artikel yang membutuhkan analisis mendalam tentang topik tertentu tanpa harus melakukan penelitian lapangan.

Adapun tahapan studi pustaka yang sudah dilakukan melibatkan beberapa langkah utama yang sistematis untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data yang dikumpulkan:

1. Langkah pertama adalah menetapkan topik penelitian yang spesifik serta tujuan penelitian. Ini membantu mempersempit fokus dan menentukan batasan penelitian (Zed, 2004; George, 2008).
2. Pencarian literatur dilakukan melalui data base akademik, perpustakaan, jurnal, buku, dan sumber-sumber terpercaya lainnya. Kata kunci yang relevan digunakan untuk menemukan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian (George, 2008).
3. Sumber-sumber yang ditemukan dievaluasi berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kualitasnya. Sumber yang dipilih harus berasal dari penulis yang diakui dan diterbitkan oleh penerbit yang terpercaya (Creswell, 2014).
4. Data yang relevan dari sumber-sumber yang telah dipilih dikumpulkan secara sistematis. Data ini mencakup teori-teori, temuan penelitian sebelumnya, dan analisis kritis (Hart, 2018).
5. Data yang telah dikumpulkan dianalisis untuk menemukan pola, tema, dan hubungan antar variabel. Sintesis data dilakukan untuk menggabungkan informasi dari berbagai sumber menjadi sebuah narasi yang kohesif (Hart, 2018).
6. Hasil analisis dan sintesis data disusun dalam bentuk laporan penelitian yang terstruktur. Laporan ini mencakup

pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil analisis, diskusi, dan kesimpulan (Creswell, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Etika Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat Sunda

Secara etimologis tata krama berasal dari kata “tata” dan “krama” yang merupakan bahasa sangsekerta. Kata “tata” memiliki makna adat atau aturan, sedangkan “krama” memiliki arti sopan. Dengan munculnya pandangan di masyarakat tentang penilaian antara sikap yang benar dan baik maupun yang buruk. Berdasarkan pendapat Sutisna (2015:4), bahwa pernyataan yang dimaksud, sebagai berikut :

- a. ada pernyataan yang menunjukkan bahwa salah satu perilaku tersebut sesuai atau tidak dengan norma-norma moralitas yang berlaku dan bersifat wajib atau harus;
- b. pernyataan yang menilai kepribadian seseorang itu baik, buruk, jahat, atau menyenangkan, hal tersebut termasuk pada pernyataan memberikan pertimbangan moral;
- c. pernyataan-pernyataan yang merupakan memberikan penilaian pada hal-hal yang bersifat non moralitas, umpamanya memberikan pujian, tutur kata yang baik, anggukan kepala, dll.

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa tata krama akan tumbuh dan berkembang dalam diri setiap insan manusia secara permanen dengan tujuan dari menanamkan untuk membangun watak dan mental manusia agar menjadi pribadi-pribadi yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tata krama merupakan kesadaran manusia untuk membedakan perilaku yang baik dan yang buruk. Meskipun setiap kelompok masyarakat tertentu memiliki tata krama yang berbeda, tetapi pada dasarnya sama, diperuntukkan agar dapat hidup sesuai dengan aturan adat yang dianggap baik oleh masyarakat tersebut.

Adapun pendapat lainnya yang memandang pentingnya tata krama dalam kehidupan sosial muncul dari Sudaryat dalam Sutisna (2015:4), bahwa pola kebiasaan perilaku itu sangatlah baik dan terpuji apabila dilakukan dalam komunikasi dan interaksi sosial yang berdampak pada munculnya rasa simpati, menyenangkan dan tertarik, bangga dan hormat, dan pada akhirnya menimbulkan kesan indah, andalemi, sopan, halus, luwes, gagah, sportif, dan santun.

Berdasar pada pendapat di atas, bahwa kebiasaan-kebiasaan dalam perilaku sosial apabila seseorang melakukan tindakan yang baik (terpuji) dapat memunculkan rasa simpati maupun empati, rasa hormat, keluhuran budi, dan pribadi yang santun. Sebaliknya jika yang muncul adalah kebiasaan perilaku sosial yang buruk (tercela), maka akan menghadirkan egoisme, sombong, budi pekerti yang rendah, serta pribadi yang arogan. Selanjutnya jika muncul kebiasaan perilaku sosial yang ingkar terhadap sopan santun dalam komunikasi sosial akan menimbulkan kekecewaan, kegelisahan, dan keheranan yang dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan, simpati, dan rasa hormat.

Menurut Yudibrata dalam Sutisna (2015:4), bahwa tata krama dalam pergaulan sosial memiliki fungsi dan peran yang tidak sederhana, melainkan berperan besar dalam mengatur tatanan kehidupan sosial masyarakat. Adapun fungsi tata krama yang dimaksud, yaitu :

- a. fungsi personal, adalah fungsi tata krama untuk menunjukkan kedewasaan pribadi;
- b. fungsi sosial, adalah tata krama untuk menunjukkan keluwesan dalam pergaulan dan komunikasi;
- c. fungsi kultur, adalah untuk menunjukkan keluhuran budi dan kedewasaan berperilaku;
- d. fungsi edukasional, adalah untuk menunjukkan tingkat keilmuan dan keterpelajaran;

- e. fungsi integratif, adalah untuk menunjukkan keterlibatan dalam satu sistem kemasyarakatan; dan
- f. fungsi instruméntal, untuk menunjukkan tingkat kehalusan sebuah alat untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka setiap individu harus mematuhi dan melaksanakan tata krama dalam pergaulan sosial. Dengan demikian, setiap individu dapat menempatkan dirinya sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat dalam membangun komunikasi dan interaksi sosial. Tata krama merupakan norma kesopanan dengan perilaku baik kepada orang lain dengan cara menghargai perasaan orang lain, dan berlaku bagi seluruh tingkatan manusia baik anak, remaja, dewasa, maupun orang tua. Oleh karenanya, maka tata krama atau sering kita sebut sopan santun harus menjadi sebuah kebiasaan bagi setiap individu dimulai sejak usia kecil dengan mencontoh perilaku kedua orang tuanya.

Menurut Yudibrata dalam Sutisna (2015:5), tata krama sunda memiliki beberapa jenis dan dimensi, di antaranya :

- a. dimensi waktu adalah dimensi yang menunjukkan waktu tempo dulu, sekarang, dan masa yang akan datang.
- b. dimensi ruang, tempat, dan geografis adalah dimensi yang menunjukkan lingkup rumah dan di luar rumah.
- b. dimensi struktur dan strata sosial adalah dimensi yang berpusat pada sesama, atasan, bawahan, wanita, laki-laki, profesi tertentu, anak- anak, dll.
- a. dimensi fungsi cara menggunakannya adalah dimensi yang bertolak pada situasi formal dan non formal.

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa tata krama sunda memiliki jenis dan dimensi yang menunjukkan waktu dulu, sekarang, dan masa yang akan datang, memiliki ruang lingkup, memiliki strata sosial atau tingkatan sosial dalam

masyarakat sunda, dan bertolak pada situasi tertentu. Menurut Sutisna (2015:5), bahwa tata krama bahasa sunda memiliki hubungan dengan situasi dan kondisi komunikasi seseorang. Dalam hal ini, tata krama bahasa sunda menegaskan dalam hal berbicara yang sudah seharusnya memperhatikan beberapa aspek, di antaranya: aspek penutur, aspek mitra tutur, aspek tema tuturan, aspek tempat terjadinya komunikasi, aspek waktu berbicara, aspek tujuan berbicara, dan aspek situasi ketika berbicara.

Selanjutnya Djundjunan dalam Sutisna (2015:5), menjelaskan yang dimaksud dengan tata krama kinetis. Tata krama kinetis adalah segala hal yang mengatur penampilan dan tingkah laku yang berhubungan dengan gerak ragawi (kinestik), misalnya: mimik wajah, cara berdandan, memelihara kesehatan, cara berjalan, dan cara-cara lainnya yang menunjukkan segala hal yang berhubungan dengan gerak ragawi.

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa tata krama sunda kinetis adalah aturan perilaku masyarakat sunda yang berhubungan dengan gerak ragawi yang sesuai dengan norma kesopanan. Salah satu contoh, misalnya cara berjalan yang sopan ketika lewat di depan orang yang lebih tua dengan posisi badan sedikit membungkuk atau *sengkuh* dengan berucap kata "*punteun*" (permisi numpang lewat). Selanjutnya tata krama sunda *kinetis* diimplentasikan dalam kehidupan sosial atau pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat.

Meunurut Sutisna (2015:5), bahwa pergaulan merupakan kegiatan interaksi antara seseorang dengan orang lain. Dalam hal kegiatan interaksi tersebut sudah barang tentu melibatkan beberapa unsur, baik unsur internal maupun eksternal. Yang dimaksud dengan unsur internal dalam pergaulan adalah unsur yang sering muncul dari diri pribadi termasuk bahasa, perasaan, dan pengetahuan. Sedangkan faktor eksternal merupakan pengaruh dari

keadaan mitra tutur, tempat, lingkungan, budaya sosial, dan geografis. Selanjutnya Sudaryat dalam Sutisna (2015:5), menjabarkan tata krama gaul yang meliputi: dimana kita berada, bagaimana situasi dan keadaan di sekitar kita, dan siapa yang berada di hadapan kita.

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa dalam kehidupan sosial bermasyarakat atau akrab kita kenal dengan istilah pergaulan. Dalam pergaulan melibatkan faktor internal merupakan kebiasaan yang muncul dalam diri individu, baik itu bahasa maupun perilaku. Sementara itu, faktor eksternal merupakan kebiasaan yang muncul dari pengaruh pergaulan tersebut, baik itu bahasa maupun perilaku.

Menurut Sutisna (2015:6), manusia sebagai makhluk sosial memiliki makna, bahwa manusia tidak dapat hidup menyendiri, melainkan membutuhkan peran dari orang lain sebagai bagian dari kebutuhan hidup kita. Dalam hal berinteraksi sosial, manusia memerlukan berbagai aturan- aturan yang mengatur kehidupan manusia di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini, tatakrama memiliki peran untuk mengatur tatanan sosial, sebagai berikut :

- a. menghargai orang lain;
- b. bisa menempatkan diri untuk keluarga, lingkungan, dan masyarakat;
- c. bijaksana terhadap lingkungan sekitar;
- d. bisa memutuskan sebuah perkara secara adil;
- e. mau bergotong royong;
- f. tidak mau menang sendiri;
- g. memiliki rasa malu;
- h. selalu bersih hati;
- i. mau berkorban untuk kepentingan umum;
- j. rajin dan mau belajar;
- k. saling mengingatkan dalam kebaikan.

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa dalam pergaulan sosial dalam

masyarakat sunda sangat kental dengan nilai-nilai kebersamaan. Masyarakat sunda saling membutuhkan satu dengan yang lainnya dalam keberlangsungan hidup bermasyarakat. Namun dalam keberlangsungan hidup bermasyarakat tersebut, tidak sedikit konflik yang timbul dalam interaksinya. Sehingga untuk mencegah dan menanggulangi konflik yang muncul dari interaksi tersebut, diperlukan berbagai aturan-aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Aturan tersebut di masyarakat sunda di sebut tata krama sunda, misalnya berbahasa halus dan sopan, menghargai orang yang lebih tua, bijaksana, adil, gotong royong dalam kegiatan masyarakat, rendah hati, ramah, rajin, dan saling mengingatkan dalam kebaikan.

Selanjutnya menurut Sutisna (2015:6), bahwa ada juga pola dalam setiap aspek tata krama yang ditunjukkan oleh *babasan* dan *paribasa* sunda. Pola tersebut membentuk istilah baru yang diambil dari karakter masing-masing aspek. Istilah yang dimaksud terdiri atas lima kata, yaitu: *wiwaha*, *wibawa*, *wirasa*, *wirahma*, dan *wiraga*. Kemudian kelima istilah itu membentuk pola tertentu yang di anggap sebagai pola lahirnya tata krama bagi masyarakat sunda, berdasarkan *babasan* dan *paribasa*. Berdasarkan pola tersebut, tergambar bagaimana tata krama bahasa, kinetis, dan hubungan sosial saling berkaitan satu sama yang lainnya. Artinya, bahwa ketiga aspek tata krama tersebut harus hadir bersamaan dalam satu kegiatan interaksi sosial dengan kesantunan yang *berwiwaha*, *berwibawa*, *berwirasa*, *berwirahma*, dan *berwiraga*.

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa *berwiwaha* menunjukkan keharusan dalam menimbang-nimbang bahasa, kinetis, dan hubungan sosial sebelum berinteraksi sosial. Kesantunan *berwibawa* memiliki makna agar selalu menjaga kehormatan diri, orang lain, dan lingkungan dimana kita berinteraksi baik dalam berbahasa, kinetis, maupun berinteraksi. Kesantunan *berwirasa*

adalah menunjukkan agar kita senantiasa mengedepankan dan memperhatikan perasaan, merasakan, dan berperasaan dalam bertutur kata, bertindak, dan berinteraksi. Selanjutnya kesantunan *berwirahma* memiliki makna agar kita senantiasa menjaga kewirahmaan atau keharmonisan yang indah ketika kita berinteraksi baik melalui bahasa, tindakan, maupun pergaulan sosial. Dan yang terakhir adalah kesantunan *berwiraga*, memiliki makna agar kita senantiasa menempatkan diri kita, menghargai orang lain, dan lingkungan tempat kita berinteraksi tanpa harus saling menyakiti dan merugikan.

2. Etika Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat Betawi

Menurut Ayatrohaedi, dkk (1989:11), bahwa agama Islam adalah sumber dan landasan dari keseluruhan tata krama orang betawi. Dengan bersumber dan berlandaskan pada agama Islam itulah aturan-aturan yang terdapat pada tatakrama orang betawi dijadikan pedoman bertindak antara sesama orang betawi di setiap aspek kehidupannya. Karena kebudayaan betawi bersumber dan berlandaskan agama Islam, segala unsur kebudayaan suku bangsa lain yang berada di sekelilingnya mengalami proses seleksi untuk diterima atau ditolak. Bila unsur itu sesuai dengan agama Islam, unsur kebudayaan asing itu mudah diterima. Dan sebaliknya bila bertentangan dengan agama Islam, unsur kebudayaan asing itu pun mudah ditolak.

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa di kalangan orang betawi, segala kegiatan harus berpedoman pada tata krama orang betawi. Berbicara dan mendengarkan, duduk, makan dan minum, berpakaian dan berdandan, bersalaman dan menasihati, diatur pada aturan-aturan yang terdapat pada tata krama orang betawi. Apabila kegiatan bertentangan dengan pedoman pada tata krama orang betawi, maka dikatakan "pamali" dengan kata lain perbuatan dosa.

Tidak seperti halnya dengan bahasa sunda, bahasa betawi tidak mengenal tingkatan kebahasaan. Karena itu, berbicara di lingkungan keluarga yang terdiri hanya dari suami, istri beserta anak-anaknya yang belum menikah (keluarga batih) dan keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak baik yang sudah kawin atau belum, cucu, orang tua, mertua maupun kerabat-kerabat lain yang menjadi tanggungan kepala keluarga (keluarga luas), maka orang yang lebih muda harus berbicara dengan irama yang lebih halus terhadap orang yang lebih tua atau orang yang dihormati.

Menurut Ayatrohaedi, dkk (1989:12), bahwa orang yang usianya lebih tua atau orang yang dituakan bebas menentukan iramanya bila berbicara dengan orang yang lebih muda atau dianggap masih muda. Orang muda diwajibkan menegur lebih dahulu pada yang lebih tua, biasanya disertai dengan membungkukkan badannya. Ketika mendengarkan pembicaraan, orang yang lebih muda wajib mendengarkan seluruh perkataan orang yang lebih tua sambil menundukkan kepala. Orang yang lebih muda dilarang melihat orang yang lebih tua berbicara. Sedangkan berbicara dengan orang yang sebaya atau yang lebih muda, si pembicara bebas mengiramakan intonasi pembicaraan dan memandang lawan bicaranya.

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa orang betawi harus tunduk dan hormat kepada orang yang lebih tua. Selain cara berbicara ada juga tata krama dalam kegiatan duduk yang perlu diperhatikan, yaitu cara duduk dan orang lain yang duduk bersamanya. Di kala duduk di tikar, para lelaki harus melipat kedua kaki dengan sebelah kaki berada di bawah atau dijepit kaki sebelahnya (duduk bersila), dan wanita harus menekuk atau melipatkan kedua kaki ke belakang (duduk timpuh). Kedua cara duduk ini diterapkan pada kegiatan makan, santai dan menerima tamu dan membicarakan masalah keluarga yang

penting. Sedangkan di saat duduk di kursi, dilarang duduk dengan kaki diangkat dan menginjakkan kaki di alas tempat duduk. Selain itu pula dilarang seorang yang lebih muda duduk di kursi bilamana orang tua duduk di tikar atau di bawah.

Menurut Ayatrohaedi, dkk (1989:13), bahwa cara duduk yang dilarang dilakukan di saat berkumpul, diantaranya :

- duduk dekukul*, yaitu posisi duduk dengan kaki diangkat sebelah dengan tangan saling tumpang di dengkul,
- duduk berdeku*, yaitu posisi duduk dengan kedua belah kaki dilipat ke belakang dengan posisi kaki diletakan di bawah pantat dan kedua belah tangan diletakan di atas paha,
- duduk istirahat*, yaitu posisi duduk dengan kedua kaki setengah dilipat dan kedua tangan saling berpegangan dan seolah-olah tergantung di dengkul,
- duduk loa-loa*, yaitu posisi duduk dengan mengangkat sebelah kaki dan jari-jari tangan saling menjepit yang diletakan di dengkul.

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa dilarangnya cara duduk di atas, karena hal demikian mempunyai pengertian yang berlainan. *Duduk dekukul* hanya boleh dilakukan pada waktu santai dan seorang diri. *Duduk berdeku* hanya boleh dilakukan pada saat upacara agama. *Duduk istirahat* diperbolehkan pada saat istirahat. *Duduk Loa-loa* merupakan cara duduk orang yang malas.

Selanjutnya menurut Ayatrohaedi, dkk (1989:14), bahwa dalam kegiatan makan dan minum, yang paling banyak memegang peranan adalah ibu atau anak perempuan dewasa. Ibu atau gadis itu harus melakukan pekerjaan mulai dari menyediakan makanan dan minuman yang akan dimasak, memasak makanan dan minuman, menyajikan makanan dan minuman yang akan dimakan, menawarkan makanan kepada segenap kerabat yang akan

makan, melayani dalam kegiatan makan, sampai pada membereskan makanan dan minuman yang habis dimakan dan diminum. Sewaktu makan bersama, anak-anak tidak ikut serta. Anak-anak diberi makan dahulu, sesudah itu kegiatan makan bersama dilaksanakan.

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa kegiatan makan bersama adalah kegiatan makan yang dilakukan oleh orang dewasa dan remaja, baik yang ada di lingkungan keluarga batih maupun keluarga luas. Dalam makan bersama, pertama-tama ibu atau anak perempuannya yang telah dewasa menyediakan makanan dan minuman serta peralatannya. Setelah itu menawarkan kepada yang hadir. Tempat makan bersama biasanya di lantai dengan beralas tikar. Sewaktu makan bersama, setiap peserta bebas memilih tempat duduk. Akan tetapi yang mengambilkan makanan, kecuali lauk pauknya adalah ibu atau anak perempuannya yang telah dewasa.

Orangtua atau orang yang dituakan harus disediakan kobokan (tempat cuci tangan) tersendiri, sedangkan orang lain disediakan kobokan bersama. Karena tempat cuci tangan bersama, maka yang pertama kali cuci tangan adalah orang yang paling tua di antara mereka. Berbicara sewaktu makan tidak dilarang. Begitu pula mengeluarkan bunyi di tengah-tengah kegiatan makan. Bila ingin tambah nasi diharuskan menyisakan makanan yang ada di piring.

Menurut Ayatrohaedi, dkk (1989:14), bahwa pakaian yang dikenakan sehari-hari adalah pakaian untuk berbagai kegiatan di rumah, sedangkan pakaian pergi atau pesta berbeda dengan pakaian sehari-hari. Untuk pakaian pergi atau pesta dan mengaji harus dibedakan dari kedudukan seseorang. Wanita yang telah berkeluarga harus mengenakan pakaian kebaya panjang dan kerudung, sedangkan prianya mengenakan celana panjang atau sarung dan kemeja berkerah berdiri (baju koko), serta peci

sewaktu bepergian atau mengaji. Begitu pula bagi yang telah melaksanakan pergi haji, wanitanya harus mengenakan pakaian seperti yang dikenakan wanita yang telah berkeluarga dan ditambah harus mengenakan stagen (kain ikat pinggang) berwarna hijau. Sedangkan, prianya ditambah dengan memakai amben (ikat pinggang) berwarna hijau. Mengenakan dan menanggalkan pakaian di depan orang lain adalah dilarang, begitu pula membetulkan pakaian di depan orang banyak.

Mengenakan dan menanggalkan dan membetulkan pakaian harus dilakukan di tempat tersembunyi (tempat yang tidak terlihat orang lain), sedangkan menyusui anak hanya diperkenankan di depan anggota keluarganya, tetapi dilarang di depan orang yang bukan anggota keluarganya. Untuk berdandan diharuskan secara rapi dan sederhana. Dilarang berdandan secara menyolok atau berlebihan.

Menurut Ayatrohaedi, dkk (1989:15), bahwa bersalaman merupakan kegiatan yang paling menonjol di kalangan orang betawi. Pada saat bertemu dan bertamu, setiap orang harus mengucapkan salam dan berjabat tangan. Salam yang harus diucapkan adalah "Assalammu'alaikum" yang kemudian harus dibalas dengan "Wa'alaikumsalam". Untuk berjabat tangan penghormatan (berjabat tangan sambil mencium tangan orang yang dihormati), jabatan tangan medok (berjabat tangan erat-erat sambil menepuk bahu dan berpelukan), jabatan tangan curiga (tangan kanan berjabat dan tangan kiri memegang lengan orang yang dijabat tangannya), dan jabatan tangan diendus (jabatan tangan dengan mencium tangan sendiri, yang dijabat tangannya dari jauh).

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa dalam bersalaman orang yang lebih muda harus lebih dahulu mengucapkan salam dan berjabat tangan, dan yang diberi salam dan berjabat tangan, dan yang diberi salam harus membalas salam dan memberi tangan untuk dijabat. Jabatan tangan hanya



diperkenankan pada sesama pria atau sesama wanita. Pria atau wanita diperbolehkan berjabat tangan apabila dilakukan pada orang yang dihormati, orangtua, guru ngaji (alim ulama), dan sesama keluarga.

Demikian pula dengan tata cara menasihati, bahwa yang menasihati adalah orang-orang yang dituakan atau yang dihormati. Dalam menasihati orang yang lebih muda baik yang bersalah atau tidak bersalah, orangtua harus memilih tempat tersendiri, yakni tempat yang tidak didengar orang lain dan pada waktu santai atau setelah makan. Sedangkan, orang yang dinasihati harus memperhatikan kata-kata nasihat itu sambil menundukan kepala, serta tidak boleh membantah.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan studi kepustakaan yang dilakukan untuk menulis artikel ini, sistem etika yang terdapat dalam Pancasila sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila. Dalam kehidupan sosial masyarakat sunda dan betawi terkandung nilai-nilai kesantunan sosial yang dapat dijadikan pedoman terciptanya lingkungan sosial yang harmonis. Kesantunan sosial yang lahir secara bersamaan dalam bentuk bahasa, perilaku, dan pergaulan sosial masyarakat. Masyarakat harus tetap melaksanakan dan mewariskan tata krama yang ada dalam kehidupan sosial, demi mempertahankan identitas budaya dalam masyarakat sunda dan betawi. Karena itu semua merupakan warisan bangsa Indonesia yang telah menjadi nilai-nilai jati luhur budaya bangsa Indonesia yang tertuang dalam kelima sila Pancasila.

Pancasila sudah seharusnya menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam berperilaku. Sehingga terbentuk warga negara yang baik (*the good be citizen*) serasi dengan maksud negara Indonesia. Pada setiap aktivitas kehidupan di Indonesia, warga negara harus bisa melaksanakan perilaku sesuai dengan nilai-nilai sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat sesuai etika atau tata

krama yang berlaku di suatu masyarakat. Sehingga nilai-nilai jati luhur warisan kebudayaan bangsa Indonesia tetap lestari, khususnya tata krama masyarakat sunda dan betawi.

PUSTAKA ACUAN

- Aini, dan Dewi. (2022). *Sistem Etika Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Bandung: Program Studi PGSD, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Amri, S. R. (2018). Pancasila Sebagai Sistem Etika. *Voice of Midwifery*, 8 (01), 760–768. Diakses pada 04 Januari 2024 dari <https://doi.org/10.35906/vom.v8i01.4>.
- Ayatrohaedi, dkk. (1989). *Tata Krama Nasional*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Djundjuran. (2011). *Etika jeung Tatakrama sunda*. Bandung : Sonagar Press.
- George, M. W. (2008). *The Elements of Library Research: What Every Student Needs to Know*. Princeton: Princeton University Press.
- Hart, C. (2018). *Doing a Literature Review: Releasing the Research Imagination*. London: SAGE Publications.
- Kaelan. (2003). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma : Yogyakarta.
- Putri, dan Dewi. (2021). *Implementasi Pancasila Sebagai Sistem Etika*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Ruslan, Rosadi. (2010). *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Soeprpto, Sri. (2014). *Konsep Inventif Etika Pancasila Berdasarkan Filsafat Pancasila*. UNY Press: Yogyakarta.
- Sudaryanto. (2007). *Etika Pancasila Sebuah Refleksi Awal*. Fakultas Filsafat. UGM : Yogyakarta.



- Sudaryat. (2015). *Wawasan Kesundaan*. Bandung: JPBD FPBS Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sutisna, Ade. (2015). *Aspek Tatakrama Masyarakat sunda dalam Babasan dan Paribasa*. Bandung : Lokabasa, Departemen Pendidikan Bahasa Darerah FPBS Universitas Pendidikan Indonesia.
- Yudibrata. (1984). *Bagbagan Makena Basa*. Bandung : CV. Geger Sunten.
- Yulia, Leni,. Dewi, D. A. (2021). Pengamalan Butir Pancasila : Perwujudan Implementasi. 5(1), 201–211.
- Zakky, M. (2010). *Manusia, Akhlak, Budi Pekerti dan Masyarakat*. FE UI Depok.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zubair, A. C. (2013). *Kuliah Etika*. Rajawali Pers. Jakarta.